

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

No	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Alat	Hasil Penelitian
1	(Gaol , 2016)	Pengaruh <i>Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Good governance</i> yang diukur menggunakan indikator <i>control of corruption, government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality, rule of law dan voice and accountability</i> 	Panel data dengan Fixed Effect Model (FEM)	<i>Good governance</i> dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Disparitas Regional. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap struktur anggaran. Desentralisasi fiskal dan struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap <i>good governance</i> . Desentralisasi fiskal, struktur

					anggaran dan <i>good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	(Wibowo , 2013)	Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Voice and accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption</i> 	Data panel	<i>Government effectiveness</i> dan <i>rule of law</i> berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	(Alam, 2017)	<i>Government Effectiveness</i> dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Government Effectiveness 	<i>System Generalized Method of Moments (System GMM).</i>	<i>Government effectiveness</i> berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4.	(Kraay, 2005)	<i>Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Worldwide Governance Indicators (WGI) • <i>Voice and Accountability, Political Stability</i> dan Kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah secara signifikan (di kedua arah), memberikan bukti yang 		Kualitas tata kelola di sejumlah negara telah berubah secara signifikan (di kedua arah), memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan, untuk keadaan

			menunjukkan bahwa tidak ada		yang lebih baik atau lebih buruk, dalam rata-rata global pemerintahan.
5.	(Putu Purbadhamaja, 2010)	Implikasi Desentralisasi Fiskal dan <i>Good Governance</i> terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Struktur anggaran, pertumbuhan ekonomi, disparitas regional dan <i>good governance</i> 	Partial Least Square (PLS)	<i>Good governance</i> dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Disparitas Regional. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap struktur anggaran. Desentralisasi fiskal dan struktur anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap <i>good governance</i> . Desentralisasi fiskal, struktur anggaran dan <i>good governance</i> berpengaruh

					signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
6.	(Gale & Samwick, 2016)	<i>Effects of Income Tax Changes on Economic Growth</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Pajak 		<p>Tidak semua perubahan pajak akan memiliki dampak yang sama pada pertumbuhan ekonomi. Memperbaiki insentif, mengurangi subsidi distorsi yang ada, hindari keuntungan windfall, dan menghindari defisit pembiayaan memiliki efek yang lebih baik pada jangka panjang ekonomi, namun menciptakan tradeoff antara ekuitas dan efisiensi.</p>
7.	(Huang, 2014)	<i>What Really Is the Evidence on Taxes and Growth?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Pajak 		<p>Kenaikan pajak dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi sehingga pajak dapat berpengaruh negatif</p>

					terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara.
8.	(Dokmen, 2013)	<i>Environmental Tax and Economic Growth : A Panel VAR Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • Environmental Tax 	Panel VAR Analysis	Dengan menggunakan model Panel <i>Vector Autoregressive</i> , menemukan tanggapan positif dan statistik yang signifikan terhadap shock pajak lingkungan
9.	(Bayar, 2016)	<i>Public Governance And Economic Growth In The Transitional Economies Of The European Union</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Voice and accountability, political stability and the absence of violence/terrorism, government effectiveness, regulatory quality, rule of law and control of corruption</i> 	Panel data	<i>Regulatory quality</i> memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga <i>control of corruption</i> dan <i>rule of law</i> memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sementara <i>political stability</i> memiliki dampak negatif terhadap

					pertumbuhan ekonomi.
10.	(Ozsoy, 2016)	<i>Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively?</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi • <i>Rule of law, fight against corruption, voice and accountability</i> 	System Generalized Method of Moments (System GMM).	<i>Rule of law</i> merupakan dasar pembangunan sosioekonomi. Pencegahan korupsi dan kebebasan berekspresi, struktur kelembagaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kinerja suatu perekonomian khususnya untuk menganalisis hasil pembangunan peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan ekonomi di suatu daerah (Sukirno, 2008)

(Tambunan T. T., 2003), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, maka pertumbuhan ekonomi adalah penambahan

Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti peningkatan nasional. Untuk negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya tergolong besar dan tingkat pertumbuhan penduduknya yang tinggi serta ditambah dengan kenyataan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan cukup besar pada awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan laju pertumbuhan ekonomi harus lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dapat tercapai.

Menurut (Kuznet, 2004), pembangunan ekonomi adalah perubahan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik perannya terhadap pembentukan pendapatan nasional, maupun peranannya dalam penyediaan lapangan kerja.

Tiga komponen utama pertumbuhan ekonomi, antara lain: (a) akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia; (b) pertumbuhan penduduk akan dapat memberikan kontribusi angkatan kerja dalam perekonomian; dan (c) kemajuan teknologi, perkembangan teknologi juga berperan penting dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Pertambahan modal yang tidak disertai perkembangan teknologi membuat perkembangan ekonomi menjadi lebih rendah dan lambat (Todaro & Smith, 2003).

(Sameulson , Paul, Nordhaus, & Williams, 2001) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa dalam jangka panjang yang digambarkan

sebagai ekspansi output nasional dalam suatu negara karena dalam jangka panjang perhitungan PDB ada dua, yaitu PDB atas dasar harga berlaku dan PDB atas dasar harga konstan. Perhitungan PDB ada tiga metode, yaitu pendekatan dari segi produksi, pendekatan dari segi pendapatan, pendekatan dari segi pengeluaran.

Ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (negara) yaitu:

1. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumber daya manusia (*human resources*).
2. Pertumbuhan penduduk.
3. Kemajuan teknologi.
4. Sistem kelembagaan.

Manfaat pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
- b. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau Lembaga internasional lainnya.

- c. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis. Khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya (tenaga kerja dan modal). (Dornbusch, 1994)

2.2.2. Teori Ekonomi Klasik

2.2.2.1. Teori Adam Smith

Teori pertumbuhan Ekonomi Klasik yang pertama kali membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah (Smith, 1723), yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya *An inquiry the Nature and Causes of The wealth of Nation* (1776). Inti ajaran Adam Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi. Menurut Smith system ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjami pertumbuhan ekonomi sampai terjadi posisi *stationer* (*stationare state*). Posisi *stationer* terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya termanfaatkan (Tarigan, 2005). Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka Panjang secara sistematis ada dua aspek:

A. Pertumbuhan Output total

1. Sumber alam tersedia

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah paling mendasar dari kegiatan suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan batas maya bagi pertumbuhan ekonomi, jika sumber daya belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk yang ada akan memegang peranan dalam pertumbuhan output.

2. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk mempunyai peranan pasif proses pertumbuhan *output*. Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja dari masyarakat.

3. Stok barang modal

Stok barang modal menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat penting dalam proses pertumbuhan output, sehingga jumlah dan tingkat pertumbuhan tergantung pada laju pertumbuhan stok modal terhadap tingkat output total secara langsung dan tidak langsung.

B. Pertumbuhan Penduduk

Menurut Smith yang sangat menentukan jumlah penduduk pada suatu masa tertentu adalah tingkat upah pada saat itu. Tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah *subsisten* (tingkat upah yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari). Maka jumlah penduduk akan meningkat. Smith juga menanyakan bahwa tingkat upah ditentukan oleh stok kapital dan tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu jumlah penduduk akan meningkat atau menurun tergantung pada stok modal dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu.

2.2.2.2. Teori David Ricardo

Teori (Ricardo , 2010), peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkat produktivitas tenaga kerja artinya bisa memperlambat bekerjanya “*the law of dimishing return*” sehingga akan memperlambat penurunan tingkat hidup. Ricardo menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh bebrapa faktor, yaitu:

1. Sumber daya alam (dalam arti tanah).
2. Jumlah penduduk menyesuaikan diri dengan tingkat upah, di atas atau di bawah tingkat upah alamiah.
3. Kemajuan teknologi selalu terjadi.
4. Sektor pertanian dominan.

Teori ini disebutkan bahwa dalam masyarakat ekonomi terdapat tiga golongan yaitu masyarakat kapitalis, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali hasil pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional lebih besar lagi. Golongan buruh dikatakan bahwa golongan yang tergantung pada golongan kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, sedangkan golongan tuan tanah adalah mereka yang hanya menerima sewa saja dari golongan kapitalis atas tanah yang disewakan.

2.2.2.3. Teori Solow-Swan

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu banyak mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya terbatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas perkapita meningkat. Teori Neo Klasik, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu. Agar faktor produksi selalu berada pada kapasitas penuh perlu mekanisme yang menyamakan investasi dengan tabungan (dalam kondisi *full employment*). Dengan demikian, pertumbuhan yang baik membutuhkan syarat bahwa:

$$MPKI = \alpha_1 \frac{y_1}{k_1}$$

Dimana:

Suatu daerah akan mengimpor barang modal jika tingkat pertumbuhan modalnya lebih kecil dari rasio tabungan domestic terhadap modal. Dalam pasar sempurna *Marginal Productivity of Labour* (MPL) adalah fungsi langsung tapi bersifat terbalik dari *Marginal Productivity of Capital* (MPK). Hal ini bisa dilihat dari rasio modal tenaga kerja (K/L), apabila tiap daerah misalkan menghasilkan output yang homogen dan fungsi produksi yang identic maka di daerah yang K/L-nya rendah terdapat upah rill yang rendah tetapi MPK yang tinggi. Akibatnya modal akan mengalir dari daerah yang upah tinggi ke daerah yang upahnya rendah karena akan memberikan balas jasa (untuk modal) yang lebih tinggi. Mekanisme diatas

pada akhirnya akan menciptakan balas jasa faktor-faktor produksi di semua daerah sama, dengan demikian perekonomian regional pendapatan perkapita regional akan mengalami proses konvergensi (Tarigan, 2005).

2.2.2. *Good Governance*

Menurut UNESCAP dalam *good governance* memiliki 8 karakteristik utama. yaitu partisipatif, berorientasi consensus, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum, guna menjamin bahwa korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang dan masa depan masyarakat.

Menurut BAPPENAS pemerintah dalam arti paling dasar di terjemahkan sebagai sekumpulan orang yang memiliki *mandate* yang absah dari rakyat untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan pemerintahan. Pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau badan (Lembaga), atau dalam istilah lain disebut sebagai pengelola atau pengurus. Sedangkan “pemerintah” menunjuk kepada perbuatan atau cara atau urusan memerintah, misalnya pemerintah yang adil, pemerintah yang demokratis, dan sebagainya. Namun, secara umum istilah *government* lebih mudah dipahami sebagai pemerintah yaitu Lembaga beserta aparturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sedangkan *governance* memiliki arti yang lebih kompleks dibanding *government* karena menyangkut pilar-pilar *good governance* itu sendiri.

Pengertian tersebut sesuai dengan yang menyatakan bahwa governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan public. World Bank dalam memberikan definisi governance sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu, United Nation development Program (UNDP) dalam (Osborne, 2008) mendefinisikan governance sebagai “*the exercise of political economic, and administrative authority of manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan suara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (policy strategy formulation). *Economic Governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, *administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan.

Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor public adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sering di artikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

2.2.3.1. Pilar-Pilar *Good Governance*

Ada tiga pilar dalam good governance yaitu negara / pemerintah (Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif), dunia usaha swasta (*corporate governance*) dan masyarakat madani (*civil society*) yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yakni :

1. Negara

- a) Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
- b) Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- c) Menyediakan public services yang efektif dan accountable
- d) Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
- e) Melindungi lingkungan hidup
- f) Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan public

2. Swasta

- a) Menjalankan industri
- b) Menciptakan lapangan pekerjaan
- c) Menyediakan insentif bagi karyawan
- d) Meningkatkan standar hidup masyarakat
- e) Memelihara lingkungan hidup
- f) Mentaati peraturan
- g) Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat

h) Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM (Usaha kegiatan Mikro)

3. Masyarakat madani

- a) Menjaga hak-hak masyarakat terlindungi
- b) Mempengaruhi kebijakan public
- c) Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d) Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat

Upaya mewujudkan *good governance* hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar tersebut. Disamping itu jika ada pembaruan pada salah satu pilar maka harus diimbangi dengan pembaruan pada pilar-pilar lain. Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling control (checks and balances) untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh salah satu komponen lainnya. Apabila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lain maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam ketiga pilar tersebut maka akan terjadi proses yang sinergis dan konstruktif antar ketiganya sehingga secara umum sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk dapat mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

2.2.3.2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Bappenas ada empat belas nilai yang menjadi prinsip good governance yaitu :

1. Wawasan ke depan (*Visionary*)

Semua kegiatan pemerintah berupa pelayanan publik dan pembangunan diberbagai bidang harus didasarkan visi dan misi yang jelas disertai strategi pelaksanaan yang tepat sasaran. Lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan rencana strategis sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing sebagai pegangan dan arah pemerintah di masa mendatang. rencana pembangunan nasional, rencana pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah, rencana strategis kementerian/lembaga/satuan Kerja perangkat daerah merupakan wujud prinsip wawasan ke depan. tidak adanya visi akan menyebabkan pelaksanaan pemerintah berjalan tanpa arah yang jelas.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, Lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Upaya pembentukan masyarakat transparansi, forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh wujud nyata prinsip transparansi.

3. Partisipasi masyarakat (*Participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui Lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Dengan demikian kepentingan masyarakat dapat tersalurkan didalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas. Partisipasi secara menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara aktif.

4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas publik merupakan suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Para pengambil keputusan di pemerintah sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat yang bertanggung jawab kepada masyarakat maupun kepada Lembaga-lembaga yang berkepentingan dimana bentuk pertanggung jawabannya akan berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

5. Supermasi Hukum (*Rule of law*)

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu sehingga siapapun yang melanggar harus diproses dan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan Lembaga-lembaga penegak hukum,

penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.

6. Demokrasi (*Democracy*)

Perumusan kebijakan publik dan pembangunan di pusat dan di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi dimana rakyat dapat secara aktif menyuarakan aspirasinya. Keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh Lembaga eksekutif maupun legislatif harus didasarkan pada consensus sehingga kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan hasil keputusan bersama.

7. Profesionalisme dan kompetensi (*Professionalism and Competency*)

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu sehingga dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat dengan memperlihatkan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Tingkat kemampuan dan profesionalisme apratur pemerintahan yang ada perlu di evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan dilakukan peningkatan kualitas sumber daya mausia melalui Pendidikan, pelatihan, lokarya, dll.

8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Setiap masyarakat akan menghadap berbagai masalah dan krisis sebagai akibat dari perubahan situasi dan kondisi dan aparatur pemerintahan harus cepat tanggap dalam mengambil prakarsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Aparat juga harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menindaklanjutinya dalam bentuk peraturan atau

kebijakan, kegiatan, proyek atau program, seperti dengan menyediakan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website dan bentuk lainnya.

9. Efisien dan efektif (*Efficiency and Effectiveness*)

Pemerintahan harus selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dalam rangka meningkatkan kinerja dan menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

10. Desentralisasi (*Decentralization*)

Wujud desentralisasi dengan melakukan pendelegasian urusan pemerintah disertai sumber daya pendukung kepada lembaga dan aparat yang ada di bawahnya untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penerapan prinsip desentralisasi akan dapat mengurangi beban dan penggunaan sumber daya pada lembaga dan aparat di tingkat yang lebih atas serta dapat mendayagunakan sumber daya lembaga dan aparat pada tingkat yang lebih bawah sekaligus dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sehingga daya yang ada dapat digunakan secara proporsional.

11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (*Private and Civil Society Partnership*)

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan pembentukan kemitraan dan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor

swasta. Kemitraan harus didasarkan pada kebutuhan yang riil (demand driven) seperti dengan pembentukan pelayanan satu atap dan pelayanan terpadu.

12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (*Comitment to Reduce Inequality*)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tersebut akan menunjukkan adanya kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan antara pusat dan daerah yang dapat memicu konflik dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

13. Komitmen pada Lingkungan hidup (*Commitment to Enviromental Protection*)

Lingkungan hidup memiliki daya dukung yang besar terhadap berlangsungnya pemerintahan, namun dewasa ini kelestarian lingkungan hidup semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali.

Pemerintahan harus mengambil langkah dengan melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari.

14. Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*)

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan secara proposional sehingga tidak membebani anggaran belanja

dan tidak merusak pasar serta dapat meningkatkan daya saing perekonomian yang komperatif.

2.2.3.3. Karakteristik Good Governance

a. *Government effectiveness*

Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin, berarti tercapainya sasaran dan efisien merupakan bagaimana dalam mencapai sasaran dengan sesuatu yang tidak berlebihan (hemat). Dalam bentuk pelayanan publik, hal ini bagaimana pihak pemberi pelayanan melayani masyarakat seefektif mungkin dan tanpa banyak hal-hal atau prosedur yang sebenarnya bisa diminimalisir tanpa mengurangi efektivitasnya.

Mencerminkan persepsi kualitas layanan publik, kualitas layanan sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut.

Menurut MCC (miliennium Challenge Corporation) indikator *government effectiveness* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Kompetisi pegawai negeri, implementasi keputusan pemerintah yang efektif, dan kerentanan pelayanan publik terhadap tekanan politik.

2. Kemampuan untuk mengelola politik tanpa perubahan kebijakan atau interupsi yang drastis dalam pelayanan pemerintah.
3. Fleksibilitas, pembelajaran, dan inovasi dalam kepemimpinan politik, kemampuan untuk mengkoordinasikan tujuan yang bertentangan menjadi kebijakan yang koheren.
4. Efisiensi mobilisasi pendapatan dan pengelolaan anggaran
5. Kualitas infrastruktur transportasi, telekomunikasi, pasokan listrik, penyediaan layanan kesehatan masyarakat, dan sekolah sebagai ketersediaan layanan pemerintah online.
6. Konsistensi kebijakan sejauh mana komitmen pemerintah dihormati oleh pemerintah baru.
7. Prevalensi birokrasi sejauh mana penundaan birokrasi menghambat aktivitas bisnis.
8. Adanya layanan informasi dan pembayaran pajak dan mekanisme banding yang efisien dan efektif.

b. Political stability and absence violence

Indikator ini mengukur kemungkinan pemerintah akan stabil atau akan adanya penggulingan dengan cara yang inkonstitusional atau dengan kekerasan. Indikator berbagai indikator yang mengukur beragam aspek stabilitas pemerintahan, seperti unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta militer, terorisme, pembunuhan politik (*political assassination*), perang saudara, konflik bersenjata, dan fraksionalisasi SARA.

c. Regulatory quality

Indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dan regulasi yang mengizinkan dan memajukan perkembangan sektor swasta. Indikator ini mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur aspek-aspek seperti control terhadap harga dan upah, aturan investasi asing, regulasi perbankan, regulasi ekspor impor, pembatasan usaha, dan kebijakan persaingan usaha.

Yaitu kualitas regulasi persepsi kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang baik mengizinkan dan mempromosikan pembangunan sektor swasta, menurut OECD (*Organisation For Economic Co-Operation and Development*), kualitas sistem peraturan suatu negara sangat bergantung pada bagaimana caranya peraturan disusun dan dibuat. Pemerintah berkepentingan untuk memastikan bahwa peraturan mereka beroperasi secara efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial kesejahteraan dan standar lingkungan.

Menurut MCC (*Miliennium Challenge Corporation*) indikator *regulatory quality* dalam suatu negara di evaluasi berdasarkan faktor-faktor berikut:

1. Prevelensi peraturan dan persyaratan administratif yang memberatkan bisnis, kemudahan memulai dan menutup bisnis baru kemudahan mendaftarkan *property*.
2. Intervensi pemerintah dalam ekonomi, sejauh mana subsidi pemerintah membuat industri yang tidak kompetitif hidup.

3. Kebijakan pasar tenaga kerja, undang-undang ketenagakerjaan memberikan keleluasaan dalam memperkerjakan dan pemecatan control upah dan harga.
4. Kompleksitas dan efisiensi sistem perpajakan, kebijakan pajak proinvestasi.
5. Kebijakan perdagangan, ketinggian hambatan tarif, jumlah band tarif, stabilitas tarif, sejauh mana hambatan non-tarif digunakan, transparansi dan prediktabilitas rezim perdagangan.
6. Daya tarik investasi, prevelensi larangan atau persyaratan perizinan investasi, peraturan keuangan tentang investasi dan modal asing, pembatasan legas atas kepemilikan bisnis dan ekuitas oleh bukan penduduk, peraturan mata uang asing, ketidakpastian umum tentang biaya regulasi, peraturan hukum lembaga keuangan, sejauh mana kebijakan nilai tukar menghambat daya saing perusahaan.
7. Kelengkapan antara hukum dan efektifitas peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan sekuritas, biaya peraturan, undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tidak pasti
8. Kekuatan sistem perbankan , adanya hambatan memasuki sektor perbankan, kemudahan akses ke pasar modal, perlindungan bank domestik dari persaingan asing, apakah suku bunga sangat diatur, biaya transfer yang terkait dengan modal ekspor

9. Partisipasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur, dominasi perusahaan milik negara, keterbukaan kontrak sektor publik terhadap investor asing, tingkat persaingan pasar, efektivitas kebijakan dan undang-undang pesaingat dan anti-*trust*
10. Adanya kerangka kebijakan hukum dan kelembagaan yang mendukung pengembangan sektor keuangan perdesaan berbasis pasar yang efisien, adil dan dapat diakses oleh penduduk berpendapatan rendah di daerah perdesaan
11. Penerapan kerangka kebijakan, hukum dan peraturan yang tepat untuk mendukung kemunculan dan pengembangan sektor usaha pedesaan swasta yang efisien, penetapan prosedur sederhana, cepat dan transparan untuk membangun usaha agribisnis swasta
12. Adanya kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung pengembangan dan liberalisasi pasar pertanian berbasis komersial (untuk input dan produksi) yang beroperasi secara liberal dan sectoral, efisien secara fungsional dan adil, dapat diakses untuk petani kecil

d. Voice and accountability

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab pada publik dan lembaga stakeholder, akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan

yang dibuat, apakah keputusan untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam sektor publik, yang juga termasuk birokrasi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

2.2.3.4. Ciri-Ciri *Good Governance*

Menurut (Ida, 2002), ciri-ciri *Good Governance* sebagai berikut:

1. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi.
2. Komunikasi, yakni adanya jaringan multi sistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
3. Proses penguatan diri sendiri (*self enforcing process*), dimana ada upaya untuk mendirikan pemerintah (*self governing*) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi.
4. Keseimbangan kekuatan (*balance of forces*), di mana rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan kompleksitas, harmoni, dan kerjasama.

5. Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat koordinasi yang fasilitasi.

2.2.3.5. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Government Governance*)

Model tata kelola (*governance model*) pemerintah dicirikan oleh perubahan dalam peran pemerintah dari satu-satunya “pemain” menjadi satu dari banyak “pemain”. Tata kelola pemerintahan (*governance*) ditandai dengan perubahan peran pemerintah di masyarakat, dimana aktor non pemerintah, seperti warga negara dan LSM, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan prinsi-prinsip demokrasi diaplikasikan dengan memberikan masyarakat hak untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan .

Tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan. Organisasi internasional menganggap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi perkembangan ekonomi dan upaya melawan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dicirikan dengan adopsi prinsip-prinsip demokratis oleh pemerintah, seperti transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan.

Tata kelola pemerintahan (*governance*) adalah cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara kebijakan dirumuskan dan

diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah standar yang digunakan untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan keuangan kepada negara lain. Institusi keuangan internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, serta negara donor, seperti Amerika Serikat dan Inggris, juga menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai standar untuk mengevaluasi sistem dan urusan penerima donor. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan apakah bantuan akan diberikan kepada negara tersebut atau tidak.

Suatu indeks dapat dibuat untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) dengan memfokuskan kepada satu atau dua aspek dari proses pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) misalnya, yang hanya mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Arnadt dan Oman (2006), berpendapat bahwa meskipun indeks tata kelola pemerintahan (*governance*) yang sempurna tidak akan pernah ada, beberapa indeks memiliki validitas dan kredibilitas lebih dibandingkan dengan indeks lain. Jumlah sumber yang digunakan untuk membangun sebuah indeks, kelengkapan proses pemerintahan yang dicakup, serta akurasi hasilnya merupakan faktor-faktor yang membuat sebuah indeks menjadi lebih kredibel dibandingkan indeks lainnya.

Dalam tataran implementatif guna mewujudkan *good governance* maka diperlukan metode untuk mengukur kapasitas *good governance* itu yang sering disebut sebagai pengukuran *Indeks Good Governance* (IGG). Pengukuran

mengenai indeks sebagai pengukuran tata kelola pemerintahan, khususnya yang berbasis *governance* sudah mulai dilakukan sejak tahun 1998 melalui indeks tersebut, sebenarnya ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyusun indeks pemerintahan berbasis *governance*. Secara umum, berbagai pendekatan tersebut membangun indikator-indikator *governance* yang antara lain terutama mensyaratkan adanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum (*rule of law*).

Indikator yang digunakan dalam survei mencakup isu-isu *governance* :

1. Akuntabilitas
2. Partisipasi
3. Penegakan hukum
4. Keadilan
5. Responsivitas
6. Politisi
7. Tingkat KKN
8. Kualitas layanan publik

Berbeda dari model-model sebelumnya yang melakukan pengukuran Indeks *Good Governance* untuk tingkat pemerintah pusat (nasional). GDS melakukan pengukuran IGG untuk tingkat pemerintah Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi.

Tujuan dari indeks tata kelola pemerintahan yaitu, menciptakan *World Governance Index* (WGI) yang memberikan gambaran keseluruhan tata kelola dunia pada saat berdasarkan data yang diperoleh untuk 179 negara yang termasuk

dama survei. WGI menggabungkan 5 indikator, masing-masing terdiri dari 13 sub-indikator, masing-masing terdiri dari 37 indeks. Indeks ini dipilih dari database terbaik yang tersedia, semuanya disediakan oleh sumber daya yang dikenal dengan

Tabel 1. 6 World Governance Index

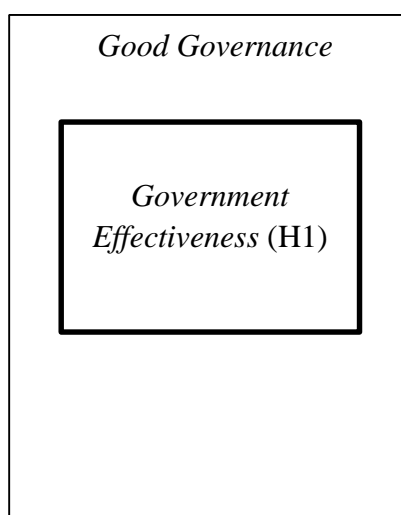
Indikator	Sub-Indikator	Indeks
<i>Rule of Law</i>	Badan hukum	Ratifikasi Internasional perjanjian perlindungan hak milik
	Sistem yang legal	Kemerdekaan efektivitas penyelesaian sengketa kontrak
	Korupsi	Indeks persepsi korupsi
Hak Asasi Manusia/Partisipasi	Hak sipil dan politik	Menghormati hak-hak sipil menghormati hak integritas fisik Kebebasan pers kekerasan terhadap pers
	Partisipasi	Partisipasi dalam kehidupan politik proses pemilihan dan pluralism budaya politik

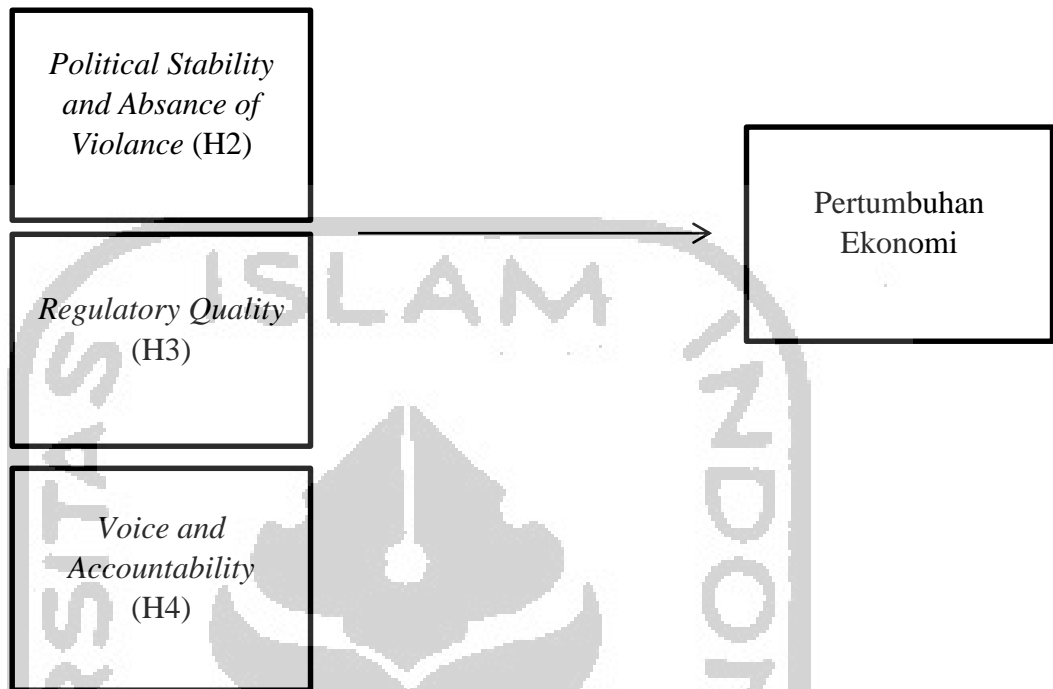
Pembangunan Berkelanjutan	Sektor ekonomi	GDP per kapita tingkat pertumbuhan GDP tingkat Inflasi kemudahan dalam memulai bisnis
Pengembangan Manusia	Pembangunan	Pembangunan manusia
	Kesejahteraan/Kebahagiaan	Kesejahteraan subjektif kebahagiaan

kualitas, keseriusan dan keandalannya, Memotivasi aktor-aktor tata kelola dunia untuk mempertimbangkan WGI yang dihasilkan dan kepentingan relatif dari berbagai indikator. Ini memungkinkan mereka mengidentifikasi indikator “kunci” atau “pilot” yang akan menyiapkan kondisi untuk tata kelola dunia yang baik dan yang lebih penting, menjamin keberjakutannya. Atas dasar situasi yang digambarkan oleh WGI dan diagnosis nya, seharusnya memungkinkan actor yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mempertimbangkan solusi.

2.3. Kerangka Pemikiran

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *government effectiveness, political stability and absence of violence, regulatory quality dan voice and accountability*.





2.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga *Government Effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017.
2. Diduga *Regulatory Quality* berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017

3. Diduga *Political Stability and Absance of Voilance* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017
4. Diduga *Voice and Accountability* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN selama 2007-2017

